

Analisis Penyelesaian Konflik Invasi Rusia-Ukraina dari Perspektif Hukum Internasional

Moody Rizky Syailendra Putra¹ Luqyana Shafira Alfarhani² David Edyson³ Ryanson Donovan Sinaga⁴

Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: moodys@fh.untar.ac.id¹

Abstrak

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi titik api yang mengguncang tatanan keamanan global. Aksi militer tersebut tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan yang besar di Ukraina, tetapi juga memicu krisis ekonomi global dan memicu kekhawatiran akan ketidakstabilan keamanan di Eropa, bahkan konflik inipun berpengaruh terhadap stabilitas global. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi banyak peristiwa yang berkaitan dengan invasi Rusia terhadap Ukraina, yang menunjukkan bahwa tindakan Rusia tersebut memiliki beberapa latar belakang yang perlu dipahami. Dari perspektif internasional, konflik Rusia-Ukraina mempengaruhi hubungan internasional negara-negara, stabilitas hubungan politik antara negara-negara, keamanan global, dan hukum internasional. Untuk mengurangi dampak negatif dari konflik tersebut, perlu dilakukan perilaku yang mendukung penyelesaian sengketa internasional, stabilitas hubungan politik antara negara-negara, dan stabilitas ketentraman global. Artikel ini mengkaji invasi dari perspektif hukum internasional, khususnya menganalisis latar belakang atau tujuan terjadinya invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina, menelaah dampak multidimensi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut, serta mengeksplorasi solusi potensial untuk mengakhiri konflik. Selanjutnya metode penelitian yang akan digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian normatif. Kami menggunakan metode tersebut Metode penelitian hukum normatif mempelajari norma dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam konflik ini, analisis norma dan kaidah hukum internasional dan nasional membantu memahami bagaimana hukum tersebut digunakan dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat, dan bagaimana solusi yang tepat dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku (Hukum Positif).

Kata Kunci: Invasi, Konflik, Rusia, Ukraina

Abstract

Russia's invasion of Ukraine in February 2022 became a flashpoint that shook the global security order. This military action not only caused a major humanitarian crisis in Ukraine, but also triggered a global economic crisis and sparked concerns about security instability in Europe, this conflict even affected global stability. In recent years, there have been many events related to Russia's invasion of Ukraine, which shows that Russia's actions have some background that needs to be understood. From an international perspective, the Russian-Ukrainian conflict affects the international relations of states, the stability of political relations between states, global security, and international law. To reduce the negative impact of this conflict, it is necessary to carry out behavior that supports the resolution of international disputes, the stability of political relations between countries, and the stability of global peace. This article examines the invasion from an international law perspective, specifically analyzing the background or purpose of Russia's invasion of Ukraine, examining the multidimensional impacts resulting from this event, and exploring potential solutions to end the conflict. Furthermore, the research method that will be used in this article is the normative research method. We use this method. Normative legal research methods study applicable legal norms and rules. In this conflict, analysis of international and national legal norms and rules helps understand how these laws are used and how they influence the behavior of the parties involved, and what solutions are appropriate and in accordance with applicable legal rules (Positive Law).

Keywords: Invasion, Conflict, Russia, Ukraine



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Rusia merupakan salah satu negara adidaya yang besar dengan kekuatan yang signifikan dan memiliki peran penting dalam hubungan internasional, karena mampu memberikan pengaruh secara global. Sementara itu, Ukraina adalah negara pecahan dari Uni Soviet yang merdeka pada 1 Desember 1991 melalui referendum yang diselenggarakan oleh masyarakat Ukraina, sehingga kemerdekaan Ukraina diakui secara resmi oleh komunitas internasional. Sebanyak 90% masyarakat Ukraina menyetujui referendum kemerdekaan dari Uni Soviet sehingga kemerdekaan Ukraina sah secara de jure (berdasarkan hukum) dan diakui oleh komunitas internasional. Sejak tahun 1991, hubungan kedua negara ini mengalami masa masa yang rumit karena dihiasi oleh banyaknya ketegangan dan kecurigaan yang memicu terjadinya konflik diantara kedua negara tersebut. Konflik antara Rusia dan Ukraina pun sudah menjadi konflik dengan rentang waktu yang cukup panjang. Federasi Rusia dan Ukraina awalnya merupakan satu kesatuan di dalam Uni Soviet selama Perang Dunia II sedang berlangsung yang pada akhirnya Uni Soviet bubar bersama dengan Pakta Warsawa pada tahun 1991. Pada 1 Desember 1991, yang dimana warga Ukraina menyetujui sebuah referendum kemerdekaan dari Uni Soviet. Persetujuan diberikan oleh Presiden Rusia Boris Yeltsin, yang kemudian mengakibatkan pembentukan Commonwealth of Independent States (CIS) oleh Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Namun, terjadi perpecahan karena Ukraina menganggap CIS sebagai usaha Rusia untuk mengendalikan negara-negara yang dulunya berada di bawah Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet.

Pada bulan Mei 1997 Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan sebagai upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan tersebut (Oktarianisa, CNBC Indonesia. 2022). Selanjutnya pada tahun 2019 Volodymyr Zelensky terpilih menjadi presiden Ukraina setelah hampir beberapa waktu Ukraina mengalami kekosongan jabatan. Setelah menjabat sebagai Presiden Ukraina, Zelensky mengambil kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan keinginan Rusia. Selain mendorong Ukraina untuk bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa, Zelensky juga mendaftarkan Ukraina sebagai anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk meningkatkan kekuatan militer Ukraina sehingga bisa mencegah agresi Rusia ke Ukraina dan bisa menarik diri dari pengaruh Rusia. Sejak saat itu, Rusia tidak menerima kebijakan tersebut, dan tepat pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melakukan invasi ke Ukraina yang dilakukan atas perintah Presiden Rusia Vladimir Putin yang disampaikan melalui pidatonya. Dalam pidatonya, Putin hanya mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina yang mendukung Rusia, yaitu Donetsk dan Luhansk. Dan juga invasi dilakukan sesuai dengan perjanjian persahabatan yang memungkinkan Rusia mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Krimea Ukraina, serta membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan Pelabuhan Sevastopol, dan kemudian diratifikasi oleh Federal Musyawarah dan gotong royong dengan DPR.

Dampak dari tindakan invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina ini meliputi dugaan pelanggaran hak asasi manusia, pencederaan kedaulatan Ukraina oleh Rusia, pelanggaran hukum internasional, mengganggu stabilitas politik hingga ekonomi global, dan terjadinya perdebatan dan penekanan besar terkait perlunya menegakkan aturan-aturan yang melindungi HAM dan keadilan. Maka dari itu pada penelitian kami kali ini, kami akan mengusut maksimal terkait latar belakang terjadinya invasi, motif juga tujuan terjadinya invasi, kronologi kejadian, dan solusi terbaik terkait konflik ini dari sudut pandang Hukum Internasional. Rumusan masalah: Berdasarkan analisis kami, khususnya pada latar belakang terjadinya konflik, kronologi, hingga dampak dari kronologi tersebut, maka kami memutuskan rumusan masalah sebagai berikut, yang selanjutnya akan kami bahas pada bagian analisis pembahasan. Bagaimana latar belakang dan dampak dari terjadinya invasi Rusia-Ukraina? Bagaimana peran

PBB dalam konflik Rusia-Ukraina itu? Bagaimanakah konflik resolution terhadap invasi Rusia-Ukraina, berdasarkan pandangan hukum internasional?

METODE PENELITIAN

Seperti yang sebelumnya sudah kami bahas pada bagian abstrak, kami menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang berfokus pada analisis dan interpretasi hukum yang berlaku, serta analisis kebijakan hukum yang telah diambil. Dalam penelitian hukum normatif, kami sebagai peneliti mempelajari dan menganalisis hukum yang telah diundangkan dan diimplementasikan, serta menganalisis norma dan kaidah hukum internasional dan nasional untuk membantu memahami bagaimana hukum tersebut digunakan dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat, dan bagaimana solusi yang tepat dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku (Hukum Positif). Alasan utama kami menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah Keterkaitan dengan hukum yang berlaku: Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis hukum yang berlaku dalam konteks invasi Rusia terhadap Ukraina. Lalu Analisis kebijakan hukum: Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk mempelajari dan menganalisis kebijakan hukum yang telah diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, seperti Rusia dan Ukraina. Dan Analisis prinsip-prinsip hukum: Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti prinsip perlindungan warga sipil dan prinsip perlindungan terhadap tahanan perang. Terakhir Analisis kebijakan hukum sebagai solusi yang efektif: Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis kebijakan hukum yang efektif dalam mengatasi konflik dan mempertahankan hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dampak invasi Rusia ke Ukraina secara menyeluruh dengan berfokus pada tiga pilar utama:

1. Dampak Sosial: Memahami luasnya krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh invasi, termasuk jumlah korban, pengungsi, dan korban. mengevaluasi konsekuensi yang disebabkan oleh perang terhadap infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, dan sistem air. evaluasi seberapa efektif respons kemanusiaan internasional untuk membantu warga Ukraina.
2. Pengaruh Ekonomi: mengamati dampak invasi terhadap rantai pasokan, energi, dan harga pangan. mengevaluasi konsekuensi sanksi ekonomi yang dikenakan terhadap Rusia dan dampaknya terhadap ekonomi global. Untuk mengevaluasi potensi pemulihan ekonomi Ukraina setelah perang.
3. Dampak Nasional: memahami efek invasi terhadap tatanan geopolitik dunia dan hubungan internasional. mengevaluasi akibat politik bagi Ukraina, Rusia, dan negara-negara Eropa Timur lainnya. mengevaluasi fungsi PBB, NATO, dan UE dalam menangani konflik.

Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah: memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang konsekuensi invasi Rusia ke Ukraina dari berbagai sudut pandang. mengidentifikasi kesulitan dan peluang yang muncul sebagai hasil dari konflik ini. mendukung upaya untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai dan menciptakan kembali stabilitas di wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi banyak orang, seperti Pembuat kebijakan: Memberikan informasi yang akurat dan analisis yang mendalam untuk membantu proses pengambilan keputusan terkait respons terhadap krisis di Ukraina. Organisasi Kemanusiaan: Berkontribusi pada pembuatan dan pelaksanaan program bantuan yang efektif bagi warga Ukraina. Media dan masyarakat umum: Meningkatkan

pemahaman tentang kompleksitas konflik dan bagaimana hal itu berdampak pada dunia. Peneliti dan akademisi: menciptakan dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang berbagai aspek konflik dan konsekuensi yang ditimbulkannya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang dan Dampak Terjadinya Invasi Rusia-Ukraina

Seperti yang sudah kita bahas pada latar belakang, bahwa Rusia merupakan salah satu negara adidaya yang besar dengan kekuatan yang signifikan dan peran penting dalam hubungan internasional karena mampu memberikan pengaruh secara global. Sementara itu, Ukraina adalah negara pecahan dari Uni Soviet yang merdeka pada 1 Desember 1991 melalui referendum yang diselenggarakan oleh masyarakat Ukraina, sehingga kemerdekaan Ukraina diakui secara resmi oleh komunitas internasional. Federasi Rusia dan Ukraina pada awalnya adalah satu kesatuan di dalam Uni Soviet selama Perang Dunia II sedang berlangsung yang akhirnya membuat Uni Soviet bubar bersama dengan Pakta Warsawa pada tahun 1991. Pada saat itu, tepatnya pada 1 Desember 1991, warga Ukraina menyetujui sebuah referendum kemerdekaan dari Uni Soviet. Lebih dari 90% warga Ukraina memilih untuk merdeka, dengan suara bulat di setiap wilayah, termasuk 56% di Krimea.

Sebelum terjadinya invasi ini, Rusia dan Ukraina sudah sering memiliki konflik dan ketegangan antara keduanya. Contohnya pada tahun 2013, di bawah kepemimpinan Presiden Viktor Fedorovich Yanukovych, Ukraina bergerak lebih dekat ke Rusia, namun pada tahun tersebut rakyat Ukraina menuntut agar Yanukovych tidak bergabung dengan Komunitas Ekonomi yang dipimpin Rusia pada tahun tersebut, sehingga Yanukovych mengadakan referendum yang membuat 80% masyarakat memberikan suara yang mendukung. Dengan itu, rakyat Ukraina memiliki keinginan agar Ukraina bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa. Yanukovych, presiden yang pro-Rusia, tahu bahwa Rusia tidak akan menyukai hal ini, sehingga referendum tersebut dibatalkan secara sepihak, yang menyebabkan demonstrasi massal menuntut pemecatan Yanukovych dari jabatannya. Yanukovych digulingkan pada Januari 2014, meninggalkan kursi kosong di Ukraina, maka dari itu Ukraina mengalami kekosongan jabatan dan rakyat Ukraina pun sibuk untuk memilih presiden baru. Merasakan peluang ini, Rusia melakukan jajak pendapat di Krimea, yang mana mayoritas warga Krimea menyatakan bahwa Krimea tidak lagi menjadi bagian Ukraina sampai proses PBB selesai. Insiden tersebut memicu konflik besar antara Rusia dan Ukraina, dan kedua negara yang menyetujui Perjanjian Minsk pada tahun 2015 untuk menghentikan kekerasan tersebut. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan gencatan senjata, penghapusan senjata berat, dan kendali penuh atas pemerintah Ukraina di seluruh wilayah konflik.

Pada tahun 2019, Volodymyr Zelenskyy terpilih sebagai Presiden Ukraina. Zelenskyy mengatakan dalam kampanye pemilihannya bahwa ia akan mengakhiri semua ketegangan yang muncul pada tahun itu dan membawa Ukraina lebih dekat ke Eropa daripada Rusia. Zelenskyy mengambil tindakan yang bertentangan dengan keinginan Rusia. Presiden Zelenskyy tidak hanya mendorong Ukraina untuk bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa, tetapi juga berupaya mencegah agresi Rusia terhadap Ukraina dan membangun kemampuan militer Ukraina untuk melawan penarikan pengaruh Rusia yang terdaftar sebagai anggota Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO). Ukraina dan NATO telah menjalin kerja sama sejak tahun 1992, dan pada tahun 1997 Komite Ukraina-NATO dibentuk sebagai forum konsultasi keamanan tanpa perjanjian keanggotaan formal. Namun, Presiden Zelenskyy saat itu sedang mempertimbangkan untuk mendaftarkan Ukraina sebagai anggota resmi NATO, agar tidak ada lagi pembatas antara Rusia dan NATO yang menjadi ancaman bagi Rusia. Akhirnya kejadian tersebut pun berdampak terhadap Rusia yang menginvasi Ukraina agar tidak dapat bergabung

dengan NATO. Latar belakang dan penyebab awal invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa faktor, namun pada penelitian kali ini kami berfokus kepada konteks pasca bubarnya Uni Soviet sampai terjadilah invasi dan perpecahan perang tersebut pada 24, Februari 2022 lalu.

Konteks Pasca-Soviet dan Revolusi Oranye

Ukraina telah mengalami perubahan politik dan keamanan sejak Revolusi Oranye pada tahun 2004, yang memicu perubahan kebijakan luar negeri Ukraina dan meningkatkan kerjasama dengan Uni Eropa dan NATO. Berdasarkan yang telah kami analisis, Uni Soviet, berdiri tahun 1922 dan merupakan federasi yang terdiri dari 15 republik, termasuk Ukraina. Berikut beberapa anggota Uni Soviet pada awalnya. Anggota Uni Soviet: Rusia, Ukraina, Belarus, Transkaukasia (Armenia, Azerbaijan, Georgia), Asia Tengah (Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan), Moldova, Estonia, Latvia, Lithuania. Pembentukan: Uni Soviet didirikan setelah Revolusi Bolshevik tahun 1917, di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin. Tujuannya adalah untuk menciptakan negara sosialis di mana rakyatnya memiliki kendali atas alat-alat produksi dan kekayaan. Pecahnya Uni Soviet: Uni Soviet mulai mengalami disintegrasi pada akhir tahun 1980-an, karena berbagai faktor, termasuk; Ketidakpuasan terhadap pemerintahan komunis: Banyak rakyat Uni Soviet tidak puas dengan sistem politik dan ekonomi yang represif. Kebangsaan: Republik-republik di Uni Soviet ingin lebih merdeka dan mengendalikan sumber daya mereka sendiri. Perestroika dan Glasnost: Kebijakan reformasi yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev melemahkan kontrol pusat dan mendorong nasionalisme di republik-republik.

Pada tahun 1991, Uni Soviet resmi bubar. Ukraina menjadi negara merdeka, bersama dengan 14 republik lainnya. Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia dan Ukraina terus menjalin hubungan dekat. Pada tahun 1994, Ukraina setuju untuk meninggalkan persenjataan nuklirnya dan menandatangani Memorandum Budapest tentang Jaminan Keamanan dengan syarat bahwa Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat akan memberikan jaminan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan untuk melawan integritas teritorial maupun kemerdekaan politik Ukraina. Namun Rusia melanggar perjanjian tersebut, karena percobaan yang dilakukan Ukraina untuk bergabung bersama NATO yang tentu saja tidak disetujui Rusia. Dengan adanya hal tersebut maka terjadilah invasi bahkan gencatan senjata yang dilakukan Rusia sebagai bentuk penolakan dan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Ukraina. Hubungan Rusia-Ukraina dan Pecahnya Perang Alasan Rusia Tidak Melepaskan Cengkeraman: Sejarah: Ukraina memiliki sejarah panjang dan kompleks dengan Rusia. Kedua negara berbagi budaya dan bahasa yang sama, dan Ukraina pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Geopolitik: Ukraina terletak di posisi strategis antara Rusia dan Eropa. Rusia ingin memastikan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO atau Uni Eropa, yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanannya. Ekonomi: Ukraina memiliki cadangan sumber daya alam yang kaya, seperti batubara, besi, dan mangan. Rusia ingin mengendalikan sumber daya ini untuk kepentingan ekonominya sendiri.

Puncak Ketegangan dan Invasi: Pada tahun 2014, Rusia menyerang Semenanjung Krimea dari Ukraina. Hal ini memicu konflik antara kedua negara dan sanksi Barat terhadap Rusia. Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina. Invasi ini menandai puncak dari ketegangan yang telah berlangsung lama antara kedua negara. Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melancarkan operasi militer ke Ukraina, operasi ini menandai peristiwa penting dalam perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada tahun 2014. Invasi ini juga menyebabkan sepertiga penduduk Ukraina untuk berpindah dan lainnya dari 7 juta orang Ukraina meninggalkan negaranya, yang memicu krisis pengungsi Eropa yang paling cepat sejak

Perang Dunia II. Invasi dimulai pada pagi hari (5:00 Waktu Eropa Timur, 10:00 WIB) 24 Februari 2022, ketika Putin mengumumkan "operasi militer khusus" untuk "demiliterisasi dan denazifikasi" Ukraina. Beberapa menit kemudian, serangan rudal dan udara dimulai di seluruh Ukraina, termasuk di ibu kota Kyiv, yang kemudian disertai invasi darat skala besar dari berbagai arah. Dampak Invasi Secara Keseluruhan: Dampak di Ukraina: Invasi telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah di Ukraina. Jutaan orang telah mengungsi dari rumah mereka, dan banyak yang tewas atau terluka. Ekonomi Ukraina hancur dan infrastruktur negara rusak parah. Dampak Terhadap Global: Invasi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi global. Harga energi dan pangan telah melonjak, dan pasar keuangan bergejolak. Invasi ini juga telah meningkatkan ketegangan antara Rusia dan Barat, dan memicu kekhawatiran akan perang yang lebih luas di Eropa.

Dampak Invasi Terhadap Ekonomi: Krisis Pangan dan Energi Global: Disrupsi pasokan gandum dan energi dari Ukraina dan Rusia menyebabkan harga pangan dan energi melonjak di seluruh dunia. Hal ini memicu inflasi, memperparah kemiskinan, dan mengancam ketahanan pangan di banyak negara. Contoh: Harga gandum naik 50% dalam beberapa bulan pertama setelah invasi, dan harga energi di Eropa melonjak tiga kali lipat. Kerusakan Infrastruktur: Serangan Rusia menghancurkan infrastruktur penting Ukraina, seperti pelabuhan, jalan, dan pabrik. Hal ini menghambat aktivitas ekonomi, mengganggu rantai pasokan, dan meningkatkan biaya rekonstruksi. Contoh: Pelabuhan Mariupol, yang merupakan salah satu pelabuhan ekspor gandum utama Ukraina, hancur total. Gangguan Rantai Pasokan: Perang menyebabkan gangguan pada rantai pasokan global, karena perusahaan mengalami kesulitan memperoleh bahan baku dan produk dari Ukraina dan Rusia. Hal ini berdampak pada berbagai sektor, seperti manufaktur, otomotif, dan elektronik. Contoh: Industri otomotif global mengalami kekurangan kabel karena pasokan dari Ukraina terhambat. Sanksi Ekonomi: Sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat terhadap Rusia berdampak pada nilai tukar Rubel, perdagangan internasional, dan akses terhadap sistem keuangan global. Hal ini menyebabkan resesi di Rusia dan berdampak negatif pada ekonomi global. Contoh: Nilai tukar Rubel anjlok 30% terhadap dolar AS dalam beberapa minggu pertama setelah invasi. Migrasi dan Pengangguran: Jutaan orang Ukraina mengungsi ke negara lain, baik karena perang maupun untuk mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan krisis pengungsi di Eropa dan meningkatkan pengangguran di Ukraina. Contoh: Lebih dari 10 juta orang Ukraina diperkirakan telah mengungsi dari rumah mereka sejak invasi dimulai.

Dampak Terhadap Masyarakat Ukraina: Korban Jiwa dan Luka-luka: Ribuan orang tewas dan terluka akibat pertempuran, termasuk warga sipil. Banyak di antara mereka yang menjadi korban penembakan, pengeboman, dan roket. Contoh: PBB memperkirakan bahwa lebih dari 10.000 warga sipil telah tewas dalam perang, dan jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi. Krisis Kemanusiaan: Jutaan orang Ukraina kehilangan tempat tinggal, akses air bersih, makanan, dan layanan kesehatan. Hal ini menyebabkan kelaparan, penyakit, dan penderitaan yang meluas. Contoh: Sekitar 12 juta orang di Ukraina membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan lebih dari 4 juta orang telah meninggalkan rumah mereka. Trauma Psikologis: Perang menyebabkan trauma psikologis bagi banyak orang, terutama anak-anak. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Contoh: Banyak anak-anak Ukraina mengalami mimpi buruk, ketakutan, dan kesulitan berkonsentrasi setelah menyaksikan atau mengalami kekerasan.

Resolusi: Banyak penelitian yang dilakukan untuk mencari solusi untuk mengakhiri perang di Ukraina. Beberapa solusi singkat yang dapat kami usulkan antara lain: Gencatan senjata: Gencatan senjata segera dan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Perundingan damai: Perundingan damai antara Ukraina dan Rusia untuk mencapai kesepakatan damai yang

langgeng. Sanksi: Sanksi yang lebih keras terhadap Rusia untuk memaksanya mundur dari Ukraina. Bantuan militer: Bantuan militer untuk Ukraina untuk membantunya melawan invasi Rusia. Namun, hingga saat ini, belum ada solusi yang berhasil dicapai dan perang masih terus berlangsung.

Studi Kasus Perbandingan: Pada penelitian kali ini pun kami juga menggunakan studi kasus sebagai perbandingan antara isu yang kami ambil dengan beberapa isu yang kurang lebih sama dengan isu kami. Invasi Rusia ke Ukraina merupakan pelanggaran hukum internasional yang serius. Namun, ini bukan satu-satunya contoh negara yang menggunakan kekuatan militer secara ilegal. Berikut adalah beberapa studi kasus perbandingan yang dapat dikaji untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas pada penelitian ini:

1. Invasi Amerika Serikat ke Irak (2003): Persamaan: Baik invasi Rusia ke Ukraina maupun invasi AS ke Irak sama-sama didasarkan pada klaim sepihak tanpa justifikasi yang kuat menurut hukum internasional. Perbedaan: Invasi AS ke Irak tidak mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB, sementara invasi Rusia ke Ukraina dikecam oleh sebagian besar anggota PBB.
2. Aneksasi Crimea oleh Rusia (2014): Persamaan: Kedua kasus ini melibatkan tindakan agresi oleh Rusia yang melanggar kedaulatan dan integritas teritorial negara lain (Ukraina). Perbedaan: Invasi 2022 merupakan serangan militer skala penuh, sedangkan aneksasi Crimea pada 2014 lebih bersifat taktik militer terselubung.
3. Konflik Israel-Palestina: Persamaan: Kedua kasus melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Perbedaan: Konflik Israel-Palestina lebih kompleks dan sudah berlangsung lama, dengan saling klaim historis dan teritorial yang rumit. Invasi Soviet ke Afghanistan (1979): Persamaan: Kedua kasus melibatkan penggunaan kekuatan militer oleh Uni Soviet/Rusia yang melanggar kedaulatan negara lain. Perbedaan: Invasi Soviet ke Afghanistan didorong oleh faktor Perang Dingin dan dukungan terhadap rezim komunis, sedangkan invasi ke Ukraina dilatarbelakangi oleh ketegangan geopolitik kontemporer.
4. Perang Falklands (1982): Perbedaan: Perang Falklands melibatkan konflik antara Argentina dan Inggris terkait kedaulatan wilayah, namun tidak terkait dengan pelanggaran kedaulatan secara sepihak seperti dalam kasus invasi Rusia ke Ukraina. Studi kasus perbandingan ini dapat membantu dalam memahami berbagai faktor yang dapat mendorong pelanggaran hukum internasional, serta konsekuensi yang ditimbulkan. Studi Kasus ini juga dapat menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana tanggapan masyarakat internasional terhadap pelanggaran tersebut dapat bervariasi tergantung pada konteksnya.

Peran PBB dalam Konflik: PBB memainkan peran penting dalam upaya menyelesaikan konflik dan membantu Ukraina: Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA): Memimpin respons kemanusiaan internasional dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak perang. OCHA telah mengalokasikan lebih dari \$3 miliar untuk bantuan kemanusiaan di Ukraina. Dewan Keamanan: Mengadopsi resolusi yang mengutuk invasi Rusia, menuntut penarikan pasukan Rusia, dan menyerukan de-eskalasi. Dewan Keamanan juga menunjuk Utusan Khusus untuk Ukraina untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi. Mahkamah Internasional (ICJ): Ukraina mengajukan gugatan terhadap Rusia atas pelanggaran Konvensi Genosida. ICJ telah membuka penyelidikan atas gugatan tersebut. Badan PBB Lainnya: Berbagai badan PBB lainnya, seperti UNICEF, UNHCR, dan WHO, juga memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan kepada Ukraina.

Efektivitas Upaya PBB: Upaya PBB dalam menghentikan konflik dan melindungi warga sipil masih belum optimal. Tantangan utama yang dihadapi PBB adalah: Kebuntuan di Dewan

Keamanan: Rusia, sebagai anggota permanen Dewan Keamanan dengan hak veto, dapat memblokir resolusi yang mengutuk tindakannya atau memberlakukan sanksi yang lebih keras. Kurangnya Akses ke Wilayah yang Dikuasai Rusia: PBB memiliki akses terbatas ke wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina, sehingga sulit untuk memantau situasi kemanusiaan dan memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia. Sumber Daya Terbatas: PBB membutuhkan sumber daya keuangan dan personel yang besar untuk menangani krisis kemanusiaan di Ukraina. Dana PBB seringkali kekurangan dana, dan banyak negara enggan memberikan kontribusi yang cukup. Ketidaksepakatan di Antara Negara Anggota: Negara-negara anggota PBB memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana menyelesaikan konflik di Ukraina. Hal ini membuat PBB sulit untuk mengambil tindakan yang tegas dan terkoordinasi. Terlepas dari tantangan tersebut, PBB tetap memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan, mendorong dialog, dan mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia.

Penyelesaian Konflik Berdasarkan Hukum Internasional: Penyelesaian sengketa Rusia-Ukraina harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk: Kedaulatan dan Integritas Wilayah: Ukraina berhak atas kedaulatan dan integritas wilayahnya, termasuk Crimea. Hal ini berarti Rusia harus menarik semua pasukannya dari Ukraina dan menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina. Larangan Penggunaan Kekuatan: Rusia melanggar hukum internasional dengan menggunakan kekuatan militer untuk menyerang Ukraina. Penggunaan kekuatan militer hanya diperbolehkan dalam rangka pertahanan diri atau ketika diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB. Penyelesaian Sengketa Secara Damai: Konflik harus diselesaikan melalui negosiasi dan diplomasi, bukan melalui kekerasan. PBB dan aktor internasional lainnya harus memfasilitasi dialog antara kedua pihak untuk mencapai gencatan senjata dan solusi politik yang langgeng. Akuntabilitas: Pelaku pelanggaran hak asasi manusia harus diadili. Hal ini penting untuk mencegah impunitas dan memastikan keadilan bagi para korban.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Ada beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa Rusia-Ukraina, termasuk: Negosiasi Bilateral: Ukraina dan Rusia dapat mengadakan negosiasi langsung untuk mencapai kesepakatan damai. Mediasi: Negara ketiga atau organisasi internasional dapat bertindak sebagai mediator untuk memfasilitasi dialog antara kedua pihak. Arbitrase: Kedua pihak dapat menyetujui untuk menyerahkan sengketa mereka kepada pihak ketiga yang netral untuk diputuskan. Pengajuan ke Mahkamah Internasional (ICJ): Ukraina telah mengajukan gugatan terhadap Rusia di ICJ atas pelanggaran Konvensi Genosida. ICJ dapat mengeluarkan putusan yang mengikat secara hukum tentang sengketa tersebut.

Tantangan Penyelesaian Sengketa: Mencapai penyelesaian damai untuk konflik Rusia-Ukraina akan menjadi proses yang sulit dan kompleks. Tantangan utama yang dihadapi adalah: Ketidakpercayaan yang Mendalam: Ada ketidakpercayaan yang mendalam antara Rusia dan Ukraina, yang akan membuat sulit untuk mencapai kesepakatan damai. Tuntutan Maksimalis: Kedua pihak memiliki tuntutan maksimalis yang sulit untuk dikompromikan. Intervensi Eksternal: Intervensi eksternal dari negara-negara lain dapat memperburuk konflik dan membuat penyelesaian damai lebih sulit dicapai. Terlepas dari tantangan tersebut, komunitas internasional harus terus berusaha untuk mencapai penyelesaian damai yang adil dan langgeng untuk konflik di Ukraina.

KESIMPULAN

Invasi Rusia ke Ukraina merupakan pelanggaran hukum internasional yang berdampak luas. Ukraina mengalami kehancuran dan krisis kemanusiaan, sementara Rusia menghadapi

sanksi dan isolasi. Komunitas internasional berupaya mendorong penyelesaian damai melalui diplomasi dan sanksi. Hukum internasional melarang penggunaan kekerasan dan mengharuskan negara menyelesaikan sengketa secara damai. Untuk mengakhiri konflik, Rusia harus menghentikan agresinya dan menarik pasukannya dari Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina adalah bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang telah mapan. Dengan melihat perspektif hukum internasional, invasi tersebut melanggar beberapa norma hukum, termasuk larangan penggunaan kekuatan, prinsip kedaulatan dan integritas wilayah, serta hak asasi manusia. Dampak dari invasi tersebut juga sangat luas, termasuk krisis kemanusiaan yang parah, krisis ekonomi global, dan ketidakstabilan keamanan global. Masyarakat internasional telah merespons dengan mengancam invasi tersebut dan memberlakukan sanksi terhadap Rusia sebagai respons atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan. Solusi untuk konflik Rusia-Ukraina terletak pada penyelesaian diplomatik yang melibatkan negosiasi langsung antara kedua belah pihak, mediasi oleh pihak netral, dan pematuhan terhadap norma hukum internasional. Penting untuk terus mendukung Ukraina dan menekan Rusia untuk mengakhiri agresinya, sambil memperkuat tatanan internasional pasca-Perang Dingin untuk mencegah konflik serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Selama Konflik Rusia-Ukraina." <https://www.amnesty.org/ukraine-human-rights-violations-2023>.
- Brown, M. "Economic Ramifications of the Russia-Ukraine Conflict: A Comparative Analysis" (2023).
- European Union External Action Service. "European Union's Response to the Russia-Ukraine Conflict." <https://eas.europa.eu/ukraine-response-2022>.
- Garcia, E. Politik Global: Teori Dan Praktik., 2020.
- Human Rights Watch. "Humanitarian Crisis in Ukraine: Impact of the Russian Invasion." <https://www.hrw.org/ukraine-crisis-2023>.
- Johnson, R. Hukum Internasional: Konsep, Teori, Dan Praktik. Jakarta: Penerbit Buku Kita., 2021.
- Jones, A. "The International Community's Response to the Russia-Ukraine Conflict: A Legal Perspective." (2022).
- United Nations. "Resolution on the Situation in Ukraine." <https://www.un.org/resolutions/2022/ukraine-resolution>.
- White, L. "International Legal Norms and the Russia-Ukraine Conflict: A Critical Review." (2022).